

**PENGARUH INFLASI, PDRB, DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
DI PROVINSI JAWA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2014-2018**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Alvin Abdillah  
135020101111045**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **PENGARUH INFLASI, PDRB, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2014-2018**

Yang disusun oleh :

Nama : Alvin Abdillah  
NIM : 135020101111045  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2019

Malang, 10 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



**Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.**

NIP. 197403022005012001

**PENGARUH INFLASI, PDRB, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP  
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2014-2018**

**Alvin Abdillah<sup>#</sup>, Nurul Badriyah<sup>\*</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: [alvin.abdillah2@gmail.com](mailto:alvin.abdillah2@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia semakin lama semakin besar, begitu juga pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur. Pertambahan jumlah penduduk tentu mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan apabila jumlah tenaga kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang mampu menyerapnya. Permasalahan ini menjadi penting mengingat erat kaitannya dengan pengangguran. Tingginya angka pengangguran nantinya akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat seperti kriminalitas dan fenomena-fenomena lainnya. Provinsi Jawa Timur dengan potensi pariwisatanya ternyata masih memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut di Provinsi Jawa Timur adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum. "Data yang digunakan adalah data time series selama lima tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS". "Setelah pengujian dilakukan, hasil yang diperoleh adalah secara simultan, ketiga variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan secara parsial, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018*

*Kata kunci: Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Inflasi, PDRB dan Upah Minimum.*

---

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia hidup adil, makmur dan sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah harus merata. Pembangunan memiliki pengertian yang luas yaitu suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur social, kesenjangan, pengangguran, dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang dasar 1945 tersebut Indonesia harus melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan. Tujuan dari proses pembangunan tersebut adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan social (Arsyad, 2010:11).

Tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk terwujudnya pembangunan. Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang penduduknya berjumlah 265 juta jiwa memiliki potensi yang sangat besar dalam tingkat penawaran tenaga kerja yang tinggi, angkatan kerja yang tinggi. Akan tetapi dengan tingginya jumlah tenaga kerja tersebut tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal. Pemanfaatan jumlah tenaga kerja yang tinggi tentu dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Hal tersebut merupakan faktor positif dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki masalah dalam hal tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah tingginya jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang dapat menghambat proses pembangunan. Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tinggi dan tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah secara terus menerus dapat menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Hadi Sasana, 2009).

Ketidak mampuan pemerintah dalam mengurangi peningkatan pengangguran merupakan hal yang serius. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran. Keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan daya beli sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Paramitha Purwanti, 2009:1). Akan tetapi fakta yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap dapat memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passay dan Taufik, 1990).

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2017 dan Februari 2017. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 21 juta orang bertambah sebanyak 67 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2017 dan bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 2017. Akan tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut ternyata tidak serta merta berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun sedikit dari 68,78 persen pada Agustus 2017 menjadi 68,71 persen pada Februari 2018 atau turun sebesar 0,07 poin persen. Sedangkan dibanding TPAK Februari 2017 (68,93 persen) turun sebesar 0,22 poin persen yang di jelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2014-2018**

JENIS KEGIATAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja	Juta	20,14	20,27	19,95	20,94	21,30
Berkerja	Juta	19,30	19,36	19,11	20,10	20,45
Pengangguran	Juta	0,84	0,90	0,84	0,84	0,85
TPAK	%	68,12	67,84	66,14	68,78	69,37
TPT	%	4,19	4,47	4,21	4	3,99

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2018, Diolah

Menurut tabel 1. Dengan judul penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama periode tahun 2014 – 2018 menjelaskan Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 3,85 persen atau turun sebesar 0,15 poin persen dibandingkan keadaan Agustus 2017 dengan TPT sebesar 4,00 persen. Fenomena ini terlihat sejak akhir tahun 2016 dimana TPT Jawa Timur terus menurun. Hal ini diharapkan akan menambah optimisme bahwa penurunan TPT ini akan berdampak baik bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik regional bruto dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum yang telah ditentukan oleh provinsi, begitu juga sebaliknya. Berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh turunnya produktifitas yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang tidak terkendali, berkurangnya jumlah PDRB dan besar kecilnya UMP yang ditentukan. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018 dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun menjadi ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, serta juga perlu diteliti sejauh mana peran inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh terhadap fluktuasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang. Inflasi terjadi

karena dua penyebab, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat disebut demand pull inflation. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi disebut cost inflation. Pada demand inflation terjadi kenaikan harga barang-barang secara umum, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Oleh karena itu perusahaan ingin meningkatkan produksinya dengan menambahkan tenaga kerja sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi kenaikan ongkos produksi (cost Inflation) perusahaan akan mengurangi produksinya, maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Produk domestik daerah merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah domestik, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari penduduk daerah tersebut ataupun tidak. Dalam hukum okun merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang diminta perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Semakin tinggi tingkat upah maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah karena perusahaan akan menaikkan ongkos produksinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat upah, maka perusahaan akan menambah tenaga kerjanya dan penyerapan tenaga kerja meningkat.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018?
- 2) Bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

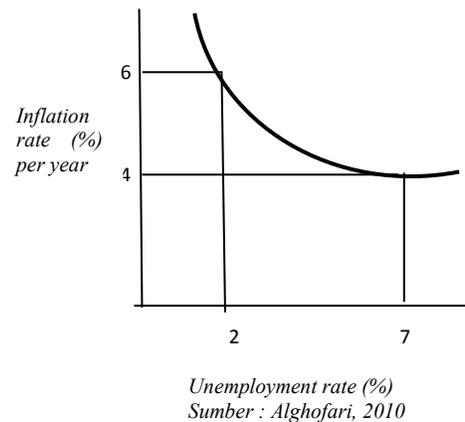
Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relatif kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum, usaha sektor informal sangat beragam. Dalam hal ini UKM merupakan salah satu indikasi dari sektor informal (Raselawati, 2011: 44).

Laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menyebabkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah akan mengakibatkan laju inflasi rendah (Mulyadi, 1995:588). Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi riil jangka panjang. Hal tersebut yang menyebabkan otoritas moneter seringkali berargumentasi bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya adalah kebijakan yang pro pertumbuhan. Boediono (2008:155) juga mendefinisikan inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya.

Inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi (Nanga, 2005:248). Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (hyper inflation) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002:65).

Gambar 1 Kurva Philips



Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang. Contoh seperti beberapa perusahaan yang berada di Jawa Timur diantaranya PT Indofood, PT Hanjaya Mandala Sampoerna, PT Semen Gresik Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk yang setiap tahun produknya mengalami peningkatan harga serta permintaan akan barangnya meningkat.

### B. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk domestik daerah merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah domestik, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari penduduk daerah tersebut ataupun tidak. Penghitungan produk domestik lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disebut domestik karena menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. Arsyad (2000:45) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Mankiw (2006:248) menjelaskan, *hukum okun* adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum okun merupakan peringatan bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (2017:1) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar di mana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

### **C. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Sadono Sukirno (2002:353) mendefinisikan upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dari kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dari organisasi dan peraturan hukum yang berlaku (Fopuhunda, et al,2011).

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8/1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

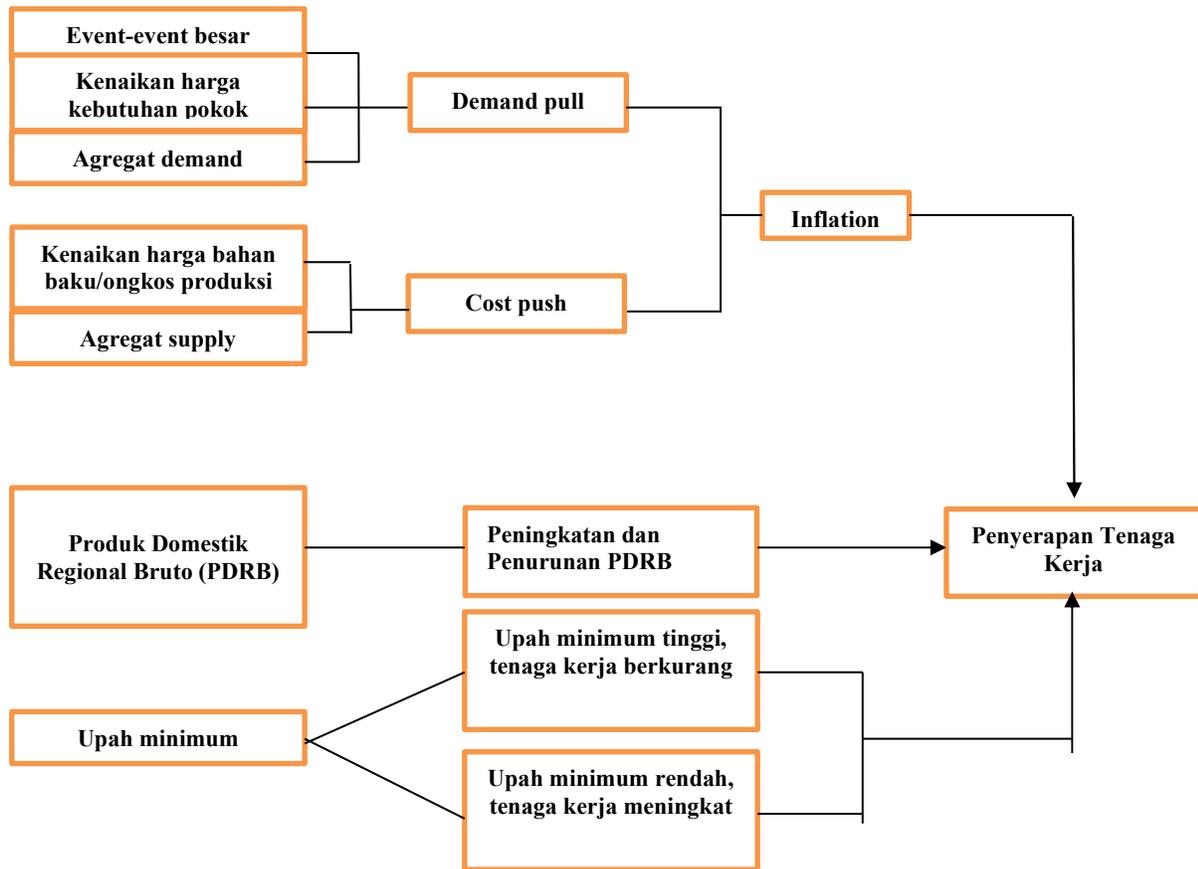
Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang diminta perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003: 106), “perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan”. Gindling dan Terrell (2006) dalam penelitian yang dilakukannya mengatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap 10 persen kenaikan upah minimum terjadi penurunan pekerja di masing- masing sektor sebesar 1,09 persen. Menurut Kuncoro (2002:38), “kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta”. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Menurut Rini (2013), kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Magruder (2013) dan Kholifah Anggrainy (2013) juga mengatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja, dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang. Penelitian yang dilakukan Rizal Azaini (2014:67) menyatakan bahwa bertambahnya nilai upah bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja, tetapi jika peningkatan upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Hal ini dilakukan karena beban yang terlalu tinggi yang ditanggung perusahaan akibat bertambahnya nilai upah.

Sumarsosno (2003:106) menjelaskan bahwa tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, konsumen akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang atau produk yang tidak terjual maka produsen harus menurunkan jumlah produksinya. Turunnya jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, itu berarti jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Upah minimum yang turun memiliki manfaat yang baik terhadap Negara karena dalam jangka panjang pengangguran dapat berkurang (Danziger, 2009). Kesimpulannya, teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila upah minimum naik maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Ringkasan kerangka pikir dalam penelitian dijelaskan dalam gambar 2 berikut:



Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 2 **Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan landasan pustaka dan kerangka pikir penelitian yang telah disusun sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang dapat dibentuk ialah sebagai berikut:

- 1) Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen nilai Inflasi (x1), PDRB (x2), upah minimum (x3), terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).
- 2) Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen nilai inflasi (x1), PDRB (x2), upah minimum (x3), terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).
- 3) Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen nilai Inflasi (x1), PDRB (x2), upah minimum (x3), terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).
- 4) Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen nilai inflasi (x1), PDRB (x2), upah minimum (x3), terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).

### C. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun menurut (Sugiyono 2011), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, sedangkan menurut (Sukmadinata, 2006) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang

diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan bersifat mengukur. Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau menggambarkan data dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada tujuan yang ingin dijawab peneliti yaitu mengetahui hubungan dan pengaruh antara beberapa variabel dan mendeskripsikan hubungan dan pengaruh antar variabel tersebut secara statistik maka jenis penelitian kuantitatif adalah solusi yang tepat untuk digunakan dalam studi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kuantitatif antara lain data perkembangan inflasi, “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018”. Sumber datanya dari data yang berbentuk laporan tahunan dan telah disusun serta diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek dari penelitian adalah Provinsi Jawa Timur sehingga penelitian ini dilakukan di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur yang diambil dari tahun 2014 hingga 2018, sebagai hasil publikasi dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Periode penelitian yang dilakukan yaitu tanggal 16 Desember 2018 hingga 28 Desember 2018.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui publikasi dari sumber-sumber lain seperti instansi, jurnal penelitian, koran, majalah, dan internet, buku, dan berbagai literature lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jurnal penelitian, tesis dan berbagai publikasi literatur lain yang berkaitan dengan studi ini

#### **D. Definisi Operasional Penelitian**

- 1) Penyerapan Tenaga Kerja  
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003). Satuan yang digunakan pada variabel ini adalah jiwa.
- 2) Inflasi  
Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan (tahun 2014-2018) Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi Jawa Timur periode tahun 2014-2018 (dalam satuan persen).
- 3) PDRB  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. PDRB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam satuan nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2007: 429). Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (yang biasanya 1 tahun). Satuan yang digunakan pada variabel ini adalah milyar rupiah.
- 4) Upah  
Besaran upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, karena para pencari kerja rela untuk menganggur untuk waktu tertentu dengan asumsi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Penentuan upah ini menggunakan rata-rata upah minimum regional (UMR) untuk kabupaten/kota se-Jawa Timur (dalam satuan rupiah).

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

- 1) Uji Asumsi Klasik
  - a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variabel dan independent variabel keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001).

- b) Uji Multikolinearitas  
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001).
- c) Uji Auto Korelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu samalainnya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson.
- d) Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2013:142) salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Setelah melakukan uji asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi linear berganda dengan alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu (Variabel independent). Ramalan (prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel independen) sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2001). Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : variabel terikat : penyerapan tenaga kerja.
- $\alpha$  : koefisien konstanta.
- $\beta_1$  : koefisien variabel inflasi
- $\beta_2$  : koefisien variabel PDRB
- $\beta_3$  : koefisien variabel Upah Minimum
- X1 : variabel inflasi
- X2 : variabel PDRB
- X3 : variabel upah minimum
- e : faktor pengganggu

## 2) Uji Statistik

### a) Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan :

$$t_h = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

Keterangan :

- $t_h$  : t hitung.
- $\beta_i$  : parameter yang diestimasi
- $S_e$  : standar error.

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak  $t_h > t_t$  maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai  $t_h < t_t$  maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

b) Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan melihat tingkat signifikansi (F) pada 5% rumus yang digunakan :

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\frac{1-R^2}{N-K}}$$

Keterangan :

$R^2$  : koefisien korelasi ganda.

$F_h$  : F hitung.

K : jumlah variabel bebas.

N : jumlah sampel yang dipakai

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai  $F_h > F_t$  maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai  $F_h < F_t$  maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternative (Ha) ditolak.

c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kebaikan suatu model penelitian (Goodness of Fit) diukur dengan menggunakan koefisien determinan ( $R^2$ ). Nilai  $R^2$  semakin mendekati satu maka dapat dikatakan model penelitian semakin baik. Dalam Classical Linear Model yang terpenting adalah parameter dari populasi dan bukan Goodness of Fit dari sampel. Walaupun  $R^2$  adalah ukuran keseluruhan model fit dengan data yang terpenting adalah teori yang mendukung model, tanda dari koefisien yang diestimasi dan signifikansi statistiknya. Jika suatu model baik dalam kriteria tadi maka model dengan  $R^2$  yang rendah dapat diterima. Jadi  $R^2$  tinggi bukan berarti baik dan sebaliknya  $R^2$  yang rendah bukan berarti jelek.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi dan sampel yang menjadi objek uji hipotesis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel. Penarikan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi disebut sebagai metode sampling jenuh. Setelah dilakukan pengamatan, identifikasi, dan dokumentasi pada *website* resmi dan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Sampel dan Data Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur	38
Jumlah sampel terpilih	38
Jumlah sampel selama lima tahun periode penelitian (2014-2018)	190
Data <i>outlier</i>	32
Data akhir	158

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diolah, 2019

Dari tabel di atas, diperoleh informasi terkait dengan anggota populasi, yakni kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebanyak 38 daerah. Dari jumlah tersebut, 29 diantaranya merupakan kabupaten, sementara 9 daerah lainnya merupakan kota. Hasil ini kemudian dikalikan dengan jumlah periode pengamatan yakni lima tahun pengamatan (2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018). Dengan demikian jumlah data yang diobservasi adalah sebanyak 190 buah (38 x 5 tahun), seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2008:124) bahwa sample jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.

Jumlah data yang diperoleh adalah sebanyak 190 buah, sepanjang periode penelitian. Ketika dilakukan pengujian statistik, terdapat sejumlah data yang terindikasi sebagai data *outlier*. Data *outlier* merupakan data observasi yang memiliki nilai ekstrim tertinggi dan terendah yang rentang nilai datanya jauh dari rata-rata nilai data lainnya (Ghozali, 2011:41). Data *outlier* yang masuk dalam model penelitian berpotensi mempengaruhi hasil dari uji statistik. Hal ini nantinya akan berdampak pada kesimpulan yang diambil. Oleh karena itu, peneliti mengambil langkah untuk mengeluarkan data yang terindikasi sebagai *outlier*. Apabila data outlier tersebut tetap digunakan dan tidak dihapus, maka data tidak akan berdistribusi normal.

Metode identifikasi *outlier* yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif *explore*. Metode ini menyajikan data-data tertentu dalam bentuk grafik. Data-data yang teridentifikasi ke dalam outlier tersaji dan terdistribusi di atas rentang data yang berada dalam grafik. Hasil identifikasi tersebut mencatat sejumlah 32 data yang teridentifikasi ke dalam data *outlier*. Jadi, jumlah data akhir yang dapat diolah adalah sebanyak 158 data.

## B. Hasil Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai karakteristik data penelitian. Informasi yang disediakan melalui pengujian ini meliputi nilai tertinggi (*max*), nilai terendah (*min*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2013; 19). Dari hasil uji statistik deskriptif, diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Max.	Min.	Std. Deviation
Penyerapan Tenaga Kerja	0.0024	0.07	-0.05	0.024
Inflasi	-0.0016	0.08	-0.25	0.061
PDRB	0.1012	0.26	-0.12	0.028
Upah Minimum	0.1474	0.38	-0.08	0.078

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Dari tabel di atas diketahui deskripsi data penelitian secara umum. Jumlah data penelitian ini adalah sejumlah 158 buah. Distribusi perubahan nilai angkatan kerja dari tahun ke tahun yang merupakan proksi untuk mengukur penyerapan tenaga kerja sebagai variabel independen pada riset ini, memperoleh nilai terendah -0,05. Nilai perubahan angkatan kerja tertinggi adalah sebesar 0,07. Nilai rata-rata perubahan angkatan kerja adalah sebesar 0,0024. Nilai standar deviasi atau *gap* nilai antar data adalah sebesar 0,024.

Berikutnya, diketahui distribusi nilai dari variabel perubahan inflasi yang diproksikan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari tabel tersebut diketahui nilai terendah variabel inflasi adalah sebesar -0,25. Sementara untuk nilai tertinggi untuk variabel ini adalah sebesar 0,08. Rata-rata kabupaten/kota memiliki tingkat inflasi sebesar 0,0016. Nilai standar deviasi dari variabel ini adalah sebesar 0,061.

Selanjutnya, deskripsi umum data penelitian adalah untuk variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diproksikan dengan perubahan PDRB setiap tahun dalam rentang periode penelitian. Variabel ini menggambarkan produk yang dihasilkan dari suatu daerah. Tingkat PDRB terendah adalah sebesar -0,12. Nilai tertinggi dari tingkat PDRB kabupaten/kota adalah sebesar 0,26. Tingkat PDRB rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebesar 0,1012. Nilai kesenjangan antar data tingkat PDRB adalah sebesar 0,028.

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah upah minimum. Upah minimum dihitung dengan memperhitungkan tingkat kenaikan UMK dari masing-masing kabupaten/kota. Tingkat upah minimum terendah adalah sebesar -0,08.

Sedangkan nilai tertingginya adalah sebesar 0,38. Tingkat kenaikan upah minimum rata-rata perusahaan sampel adalah sebesar 0,1474. Nilai *gap* antar data adalah sebesar 0,078.

### C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Riset ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat teknik analisis data. Riset ini tergolong sebagai riset eksplanatif yang bertujuan untuk memprediksi fenomena dengan menguji variabel-variabel. Sebelum melakukan uji regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Ghozali (2013; 107) model regresi yang baik adalah model regresi yang telah terbebas dari gejala asumsi klasik. Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji asumsi klasik.

- 1) *Hasil Uji Normalitas Data*. Uji normalitas merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk mengetahui distribusi normalitas data dalam suatu model regresi. Model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov test*. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

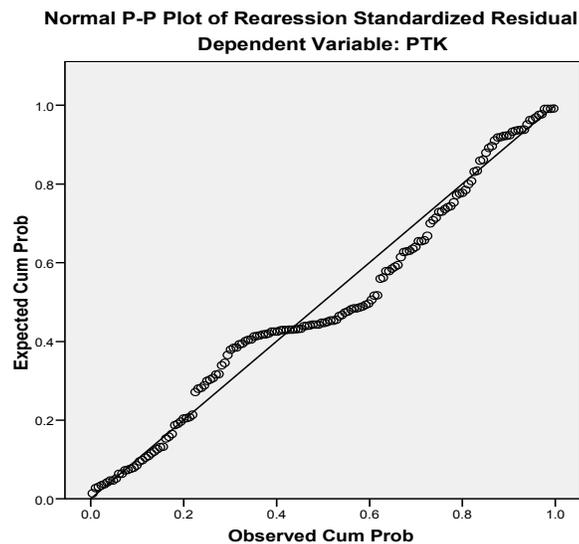
Keterangan	Nilai
Asymp. Sig. 2-tailed	0,062

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Dengan melihat hasil yang diperoleh pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi pada riset ini telah berdistribusi normal. Distribusi normalitas data dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang lebih besar daripada 0,05. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari hasil pengujian menunjukkan angka 0,062 yang berarti lebih besar daripada 0,05.

Normalitas data dalam model regresi juga dapat dilihat dari grafik *Normal P-Plot*. Grafik *Normal P-Plot* dapat digunakan sebagai pertimbangan tambahan untuk melihat normalitas data dalam model regresi. Berikut adalah grafik *Normal P-Plot* dari model regresi dalam penelitian ini.

Gambar 3 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Dari hasil uji normalitas dengan grafik *Normal P-Plot* juga dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal. Pernyataan ini dapat dilihat dari penyebaran data (titik-titik/*plot*) pada grafik di atas. Penyebaran data pada grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik data (*plot*) menyebar di sekitar garis diagonal. Distribusi dengan pola seperti ini merupakan indikasi bahwa data telah berdistribusi normal

- 2) *Hasil Uji Multikolinearitas*. Definisi multikolinearitas adalah salah satu asumsi klasik berpotensi terjadi pada riset eksplanatif, lebih spesifik pada riset yang menggunakan regresi sebagai alat analisisnya. Multikolinearitas merupakan gejala di mana hadirnya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi sederhana pengujian multikolinearitas tidak relevan. Hal ini dikarenakan regresi sederhana hanya menguji riset dengan satu variabel independen. Deteksi gejala multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Note
Inflasi	1,002	0,998	Non-Multikolinearitas
PDRB	1,044	0,958	Non-Multikolinearitas
Upah Minimum	1,044	0,957	Non-Multikolinearitas

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Pada tabel di atas, diketahui besaran nilai *Tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel independen. Nilai *Tolerance* dari setiap variabel independen secara berturut-turut yakni 0,998; 0,958; dan 0,957. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi telah terbebas dari asumsi multikolinearitas. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai *Tolerance* yang lebih besar daripada 0,1.

Selain berdasar pada nilai *Tolerance*, mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai VIF-nya. Model regresi pada riset ini memperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen secara berturut-turut adalah sebesar 1,002; 1,044; dan 1,044. Nilai ini tentunya lebih kecil daripada 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak terindikasi gejala multikolinearitas.

- 3) *Hasil Uji Autokorelasi*. Dalam suatu model regresi dengan uji regresi linier, terdapat potensi adanya korelasi antar data. Hal ini dinamakan asumsi atau gejala autokorelasi. Adanya korelasi antar data dapat berdampak pada bias dalam penarikan kesimpulan pada hasil regresi. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari gejala autokorelasi (Ghozali, 2013; 107). Uji *Durbin Watson Test* (DW-Test) lazim digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi pada model regresi. Hasil DW-Test disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	DU	DW	4-DU	Note
Inflasi	1,778	1,877	2,123	Non-Autokorelasi
PDRB	1,778	1,877	2,123	Non-Autokorelasi
Upah Minimum	1,778	1,877	2,123	Non-Autokorelasi

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Dari hasil DW-Test, nilai *Durbin Lower* (DL) menunjukkan angka sebesar 1,7014; sementara itu, nilai *Durbin Uper* (DU) sebesar 1,7787; selain itu, diperoleh nilai DW hitung adalah sebesar 1,877. Dengan menggunakan kriteria tertinggi dari DW-Test untuk menentukan kesimpulan bahwa “terjadi autokorelasi” rumus  $DU < DW < 4-DU$  digunakan. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, hasil DW-Test menunjukkan nilai  $1,7787 < 1,877 < 2,222$  ( $4-1,778$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terindikasi gejala autokorelasi. Hal ini didasarkan pada distribusi nilai DU dan DW yang dinyatakan *fit* dengan kriteria yang ditetapkan.

4) *Hasil Uji Heteroskedastisitas*. Heteroskedastisitas dapat didefinisikan sebagai gejala adanya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013; 139). Apabila dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka kondisi ini disebut Homoskedastisitas. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, gejala ini dinamakan Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser memperoleh hasil berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.231	.172		1.342	.181
	Inflasi	.701	.771	.066	.909	.365
	PDRB	-.334	1.636	-.015	-.204	.839
	Upah Minimum	-.556	.590	-.071	-.942	.347

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data diolah SPSS, 2019.

Dari hasil uji Gleser di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terindikasi gejala Heteroskedastisitas Kesimpulan ini didasarkan atas hasil uji Glejser yang menunjukkan nilai probabilitas signifikasni pada variabel yang di uji diatas 0,05 atau 5%. Variabel inflasi menunjukkan nilai 0,365, PDRB sebesar 0,839, dan upah minimum 0,347. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Abs\_Res, hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 atau 5%.

#### D. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linier berganda atas model penellitian diperoleh nilai koefisien regresi sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstanta	0,023
Inflasi	0,078
PDRB	-0,161
Upah Minimum	-0,027

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

$$\text{Penyerapan Tenaga Kerja} = 0,023 + 0,078 \text{ Inflasi} - 0,161 \text{ PDRB} - 0,027 \text{ Upah Minimum} + e$$

Berdasarkan perolehan nilai koefisien regresi yang telah diformulasikan ke dalam rumus model regresi pada penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0,023, hasil mengandung arti bahwa ketika tidak terjadi perubahan nilai pada variabel inflasi (X1), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2), dan upah minimum (CR) (X3), maka variabel penyerapan tenaga kerja bernilai 0,023.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X1) adalah sebesar 0,078, hal ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan nilai variabel inflasi sebesar satu satuan, maka variabel penyerapan tenaga kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,078.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) bernilai -0,161, hasil ini mengindikasikan bahwa ketika variabel PDRB mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar -0,161.
- 4) Koefisien regresi variabel upah minimum (X3) menunjukkan nilai sebesar -0,027, hasil ini mengandung arti bahwa ketika variabel upah minimum meningkat satu satuan, maka variabel penyerapan tenaga kerja menurun sebesar -0,027.

#### E. Hasil Uji Hipotesis

- 1) *Hasil Uji Hipotesis Simultan.* Uji hipotesis simultan dilakukan untuk menganalisis, ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari variabel-variabel yang diteliti dalam model regresi terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria untuk pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Berikut hasil uji hipotesis secara simultan atas model penelitian:

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Simultan (F)

Variabel	Alpha	Sig.	Note
X1, X2 & X3	0,05	0,002**	Ha Diterima

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Tingkat signifikansi \*10%; \*\*5%; \*\*\*1%

Dari tabel di atas yang merupakan hasil uji *Anova* diperoleh nilai signifikansi variabel inflasi (X1), PDRB (X2), dan upah minimum (X3) terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y) secara simultan. Nilai signifikansi hasil uji *Anova* adalah sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05 yang menjadi parameter toleransi kesalahan. Berdasarkan hasil perbandingan nilai signifikansi dengan nilai alpha, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel inflasi (X1), PDRB (X2), dan upah minimum (X3) terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y).

Selain merujuk dari hasil perbandingan nilai signifikansi dengan nilai *alpha*, uji hipotesis simultan juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Berikut ini merupakan hasil perbandingan antara F hitung dengan F tabel:

Tabel 10. Perbandingan F Hitung dan F Tabel

Variabel	F Hitung	F Tabel	Note
X1, X2 & X3	5,079	2,66	Ha Diterima

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai F hitung dan F tabel. Dari tabel tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 5,079. Sementara itu, untuk nilai F tabel diperoleh sebesar 2,66. Angka F tabel diperoleh dengan mengidentifikasi nilai F tabel pada tabel F dengan rumus  $df = K - 1$  di mana K adalah jumlah variabel. Kemudian menentukan  $df_2$  dengan rumus  $N - K$ , di mana N adalah jumlah sampel. Hasil perhitungan dengan rumus tersebut diperoleh  $df_1$  pada angka 3 ( $4 - 1$ ) dan  $df_2 = 154$  ( $158 - 4$ ). Nilai f hitung sesuai perhitungan ini adalah sebesar 3,863. Dengan merujuk pada kriteria perbandingan F hitung dengan F tabel, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan ketiga variabel independen dalam model penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

- 2) *Hasil Uji Hipotesis Parsial.* Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Setelah uji hipotesis simultan dilakukan, maka uji hipotesis parsial menjadi konfirmasi atas hasil uji simultan. Dalam penelitian ini, hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Untuk mengetahui variabel independen mana yang mempunyai pengaruh signifikan, maka uji hipotesis parsial dilakukan. Berikut hasil uji hipotesis secara parsial:

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Parsial (T)

Variabel	Alpha	Sig.	Note
Inflasi	0,05	0,011	H1 Diterima
PDRB	0,05	0,018	H2 Diterima
Upah Minimum	0,05	0,271	H3 Ditolak

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019  
Tingkat signifikansi \*10%; \*\*5%; \*\*\*1%

Parameter kedua yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Perbandingan ini dapat mendukung argumentasi yang disampaikan dari hasil uji signifikansi. Berikut tabel hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel:

Tabel 12. Perbandingan T Hitung dan T Tabel

Variabel	t Hitung	t Tabel	Note
Inflasi	2,577	1,655	H1 Diterima
PDRB	-2,401	-1,655	H2 Diterima
Upah Minimum	-1,104	-1,655	H3 Ditolak

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Dari hasil perbandingan t hitung dan t tabel dapat dilihat bahwa t hitung variabel inflasi (X1) lebih besar daripada nilai t tabel. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Kemudian untuk hipotesis kedua, nilai t hitung variabel PDRB (X2) lebih besar daripada t tabel. Hasil uji hipotesis kedua adalah menolak H0 dan menerima Ha. Sementara itu, uji hipotesis ketiga mengindikasikan nilai t hitung yang lebih kecil daripada nilai t tabel. Dengan ini, kesimpulan uji hipotesis ketiga adalah menerima H0 dan menolak Ha.

- 3) *Hasil Uji Koefisien Determinasi.* Untuk melihat intensitas variabel independen yang diteliti dalam menjelaskan variabel dependen, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Intensitas pengaruh dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square* maka berarti semakin baik model regresi yang digunakan karena mengindikasikan tingginya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 13. Perbandingan T Hitung dan T Tabel

Keterangan	Nilai	%
Adjusted R Square	0,072	7%

Sumber: Data hasil uji (output) SPSS diolah, 2019

Pada tabel tersebut diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,072. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel inflasi (X1), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2), dan upah minimum (X3) mampu menjelaskan variabel penyerapan tenaga kerja (Y) 7,2 %. Sementara itu, 92,8% sisanya adalah faktor lain yang tidak diobservasi ke dalam model penelitian. Seperti investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai produksi dan masih banyak faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang tidak terobservasi dalam model penelitian ini..

## F. Analisis Ekonomi

Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa secara statistik variabel inflasi yang diproksikan dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh positif dan signifikan ditunjukkan oleh variabel inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat. Penyerapan tenaga kerja yang diproksikan dengan perubahan jumlah angkatan kerja semakin meningkat akibat adanya pengaruh dari variabel inflasi.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, terdapat asosiasi negatif antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain ketika tingkat inflasi naik, maka penyerapan tenaga kerja akan menurun. Jika diasosiasikan dengan pengangguran, inflasi memiliki asosiasi positif terhadap pengangguran.

Pada penelitian ini, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena rata-rata nilai inflasi di Jawa Timur bersifat ringan. Oleh karena itu inflasi menjadi motivasi perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya dan hal itu bersamaan juga dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan dengan lapangan kerja yang tersedia, maka kesejahteraan masyarakat meningkat dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Riset ini secara empiris berhasil memperoleh bukti bahwa inflasi memiliki asosiasi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang ringan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi yang ringan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil riset ini konsisten dengan riset Dini Andriyane Prawoto (2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diperoleh kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien regresi dari menunjukkan nilai negatif, angka ini mengindikasikan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif. Pengaruh negatif signifikan menunjukkan bahwa ketika PDRB semakin meningkat, maka penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Kenaikan PDRB yang semakin besar berdampak pada penurunan perubahan jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan adanya penyerapan tenaga kerja.

PDRB yang merupakan representasi dari jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode tertentu. Berdasarkan Hukum Okun yang dikemukakan oleh Mankiw (2006:248) kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) memiliki asosiasi negatif dengan pengangguran. Sementara itu, ketika diasosiasikan dengan penyerapan tenaga kerja, PDRB secara teori menunjukkan asosiasi positif. Semakin meningkat produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah, akan berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB berdampak negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang menjadi proksi variabel penyerapan tenaga kerja. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa jumlah angkatan kerja akan menurun ketika terdapat stimulus variabel PDRB. Ketika PDRB meningkat, secara teori seharusnya semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam kesempatan kerja, yang ditandai dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar.

Hasil observasi terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur, rata-rata menghasilkan PDRB yang positif. Posisi PDRB yang menunjukkan angka positif membuat semakin terbukanya lapangan kerja. Dengan demikian, banyak tenaga kerja yang dapat memperoleh kesempatan kerja. Hasil riset ini memperoleh hasil yang sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni penelitian Dimas dan Nenek (2009), Junaidi (2013) dan Putro dan Achma (2013).

Dari hasil uji hipotesis ketiga, dinyatakan bahwa variabel upah minimum menunjukkan implikasi negatif, tetapi tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diproksikan dengan kenaikan upah minimum, maka berdampak penurunan penyerapan tenaga kerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja, namun bukan menjadi faktor primer.

Berdasarkan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, ketika upah minimum di daerah tertentu meningkat, maka *cost of production* juga akan mengalami peningkatan. Harga jual per unit juga akan meningkat akibat meningkatnya upah minimum. Permintaan barang pun juga terdampak, yakni mengalami penurunan. Ketika permintaan mengalami penurunan, maka produksi juga dikurangi. Akibatnya, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh entitas bisnis juga mengalami penurunan. Namun, pada penelitian ini hasil tersebut tidak signifikan. Kenaikan upah minimum juga disebabkan oleh tingginya PDRB industri di beberapa wilayah Jawa Timur namun perusahaan cenderung mengurangi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, terjadilah relokasi industri di mana dominasi industri yang pada awalnya berada di beberapa wilayah dominan (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik) kemudian pindah ke beberapa lokasi yang memiliki tingkat PDRB dan upah minimum yang rendah seperti Kabupaten Ngawi, Jombang dan Lamongan.

Hasil ini dapat disebabkan karena kenaikan tingkat upah minimum tidak signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara empiris dibuktikan variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil riset ini konsisten dengan penelitian Rini (2013) dan Rizal Azaini (2014).

## E. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Inflasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum secara menyeluruh memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.* Dalam penelitian ini, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh inflasi dan PDRB.
- 2) *Inflasi menunjukkan pengaruh yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.* Faktor inflasi memiliki stimulus terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang terjadi di Jawa Timur masih dalam intensitas ringan dengan nilai 2,29% akan mendorong perusahaan untuk menambahkan outputnya. Keinginan perusahaan dalam menambah output tentu akan bersamaan dengan penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- 3) *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.* Ketika PDRB mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja guna memenuhi permintaan agregat yang bertambah. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan tersedianya lowongan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran. Dengan kata lain, tenaga kerja yang semakin banyak diserap oleh perusahaan akan menciptakan kesejahteraan penduduk.
- 4) *Upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.* Upah minimum menunjukkan implikasi negatif, tetapi tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diprosikan dengan kenaikan upah minimum, maka berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja, namun bukan menjadi faktor primer. Perusahaan – perusahaan sangat mengedepankan efisiensi dan profit sebesar – besarnya. Oleh karena itu, dengan teknologi yang sangat maju, di tahun 2018 beberapa perusahaan di Jawa Timur menggunakan mesin untuk meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan hasil outputnya atau biasa disebut dengan revolusi industri 4.0.
- 5) Intensitas pengaruh yang ditunjukkan oleh hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 7,2%, sementara sisanya sebesar 92,8% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

### B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

- 1) *Bagi Kabupaten/Kota.* Dari hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan bagi kabupaten maupun kota di Jawa Timur adalah hendaknya mempertimbangkan faktor inflasi dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Faktor inflasi memiliki stimulus terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, faktor upah minimum memiliki implikasi terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah di level kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur berkoordinasi dengan industri dan serikat perkerja, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM serta kalangan usaha untuk mempersiapkan menghadapi revolusi industri 4.0 dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi..
- 2) *Bagi Pemerintah.* Rekomendasi yang dapat diberikan bagi pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Timur terkait dengan hasil riset ini adalah hendaknya pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Misalnya terkait dengan pengendalian inflasi untuk tetap dalam tingkat yang stabil, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, mendorong laju peningkatan PDRB dan pengaturan tingkat upah minimum.

- 3) *Bagi peneliti selanjutnya*, disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel yang diobservasi, serta meneliti faktor lain seperti investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai produksi, kesempatan kerja, latar belakang pendidikan serta variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, Kholifah. 2013. *Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi*. Universitas Brawijaya Malang: Jurnal Ilmiah FEB.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Jatim. 2016. *Publikasi BPS, Data Statistik*. Di. <https://jatim.bps.go.id/> (diakses pada 28 Desember 2016).
- Badan Pusat Statistik RI. 2016. *Publikasi BPS, Data Statistik*. <http://www.bps.go.id/> (diakses pada 21 Februari 2017).
- Berentsen, A. Menzio, G and Wright, R. 2009. *Inflation and unemployment in the long run. Working Paper*. Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich.
- Beyer, A. Farmer, R.E. 2007. *Natural rate doubts*. Journal of Economic Dynamics and Control. 31(3), pp.797-825.
- Boediono. 2008. *Ekonomi Makro: Edisi Keempat*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Danziger, Leif. 2009. *The Elasticity of Labour Demand and the Minimum Wage*. Journal of Population Economics. Vol. 22. No. 3(Jul, 2009). pp. 757-722.
- Dimas dan Nenek Woyanti. 2009. *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 32-41.
- Ferdinan, Hery. 2011. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pdrb, dan Upah Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat*. Institusi Pertanian Bogor: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- Fopuhunda, Tinuke. Atiku, Sulaiman Olusegun. Lawal Ibrahim Olanrewaju. 2011. *Minimum Wage Implementation and Management in a Posr Recession Economy: The Nigerian Experience*. European Scienjtific Journal. 8(7), p:18-35.
- Gindling, T.H and Terrell Katherine. 2006. *The Effects of Multiple Minimum Wage Throughout the Labour Market: The Case os Costa Rica*. Journal of Labour Economics. 14 (2007) 485-511.
- Gujarati dan Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Haug, Alfred A, Ian P. King. 2011. *Empirical Evidence on Inflation and Unemployment in the Long Run*. University of Otago Economics Discussion Papers No. 1109. 1-25.
- Junaidi, E. Momongan. 2013. *Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3. Hal. 530-539.
- Lustig, Nora, Darryl McLeod. 1996. *Minimum Wages and Poverty In Develop- Ing Countries: Some Empirical Evidence. Dept. Of Economics. Fordham University Discussion Papers In International Economics* No. 25.
- Magruder. Jeremy R. 2013. *Can Minimum Wages cause a Big Push? Envidence from Indonesia*. Journal of Devolpment Economic. 100 (2013) 48-62.

N. Gregory Mankiw. 2006. *Makro ekonom. Edisi 6*. Jakarta: Erlangga.

Sitompul, Dian Novianti. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sumatera Utara*. Jurnal Universitas Negeri Medan.

Utami, Budi dan Turminijati. 2009. *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan. Vol. 1. No. 1.

Wiguna, Atu Bagus. 2019. *Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur: Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu?*. Jurnal Ecces Economics, Social, and Development Studies Volume 6 Nomor 2.